

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Milenium ketiga merupakan tonggak bagi bangsa-bangsa untuk melakukan perubahan dalam berbagai macam aspek kehidupan, Pada awal millenium ini para pemimpin dunia menyepakati suatu "deklarasi milenium" yang berisi komitmen untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan umat manusia dan memberantas kemiskinan (Bahrul Hayat, 2010;1). Tujuan dan target pemimpin dunia itu dikenal sebagai *Millennium Development Goals* (MDGs), terutama untuk membangun kemitraan global dan menemukan titik temu mencapai tujuan bersama.

Dimasa yang akan datang, mau tidak mau setiap bangsa di dunia ini harus membangun kompetensi global, karena era global menurut Rosabeth Moss Kanter (dalam Bahrul Hayat, 2010;5) dibutuhkan sumber daya yang memiliki ketrampilan menemukan konsep-konsep baru, membuka jaringan dan memiliki kompetensi untuk memenuhi standar pekerjaan yang paling tinggi atau yang dikenal dengan 3-Cs (*Concept, competence, connection*) yang akan menjadi dirinya menjadi seorang *world class*.

World class menjadi kata kunci penting di era MDGs, Apakah sistem pendidikan kita juga memberikan ruang bagi anak bangsanya untuk menjadi *world class*? Apakah tatanan pendidikan yang dibangun di Indonesia memberikan dasar-dasar kompetensi global (*global competencies*) yang diperlukan di era sekarang? Sejauh manakah perbedaan standar mutu kompetensi lulusan siswa kita

jika dibandingkan dengan siswa seusia di mancanegara? Strategi apa yang telah dirumuskan sekolah agar mampu bersaing dan memiliki output yang *world class*?

Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar bangsa Indonesia mampu bersaing di era dalam *Millennium Development Goals* (MDGs), melalui DPR dan Presiden pada tanggal 11 Juni 2003 telah mensahkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, sebagai pengganti Undang-undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989.

Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang terdiri dari 22 Bab dan 77 pasal tersebut juga merupakan pengejawantahan dari salah satu tuntutan reformasi yang marak sejak tahun 1998. Perubahan mendasar yang dicanangkan dalam Undang-undang Sisdiknas yang baru tersebut antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, dan jalur pendidikan. Reformasi bidang pendidikan memberikan arah baru dalam melihat mutu pendidikan tidak hanya dalam perspektif lokal, namun regional dan internasional.

Munculnya Sekolah Bertaraf International (SBI) di Indonesia apakah bisa dianggap sebagai langkah maju untuk menjawab perlu dikembangkannya pendidikan setara luar negeri atau Internasional ?. Pengembangan SBI sendiri didasarkan pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 50 ayat 3 yang secara garis besar ketentuan ini berisi bahwa pemerintah didorong untuk mengembangkan satuan pendidikan bertaraf internasional. Visi SBI sendiri yakni

mewujudkan insan Indonesia cerdas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Y.M.E, berakhlak mulia, berjati diri Indonesia, dan kompetitif secara global. Dengan adanya dasar dan visi pengembangan SBI tersebut pemerintah terus berusaha menyertakan ratusan SMP dan SMA seluruh Kabupaten/Kotamadya di Indonesia dengan memberikan sokongan dana ratusan milyar rupiah.

Pembentukan SBI sendiri harus mengacu pada standar perumusan SBI yakni $SBI = SNP + X$. SNP adalah Standar Nasional Pendidikan dan X adalah penguatan untuk berdirinya SBI seperti sebagai penguatan, pengayaan, pengembangan, perluasan, pendalaman, adopsi terhadap standar pendidikan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang diyakini telah memiliki reputasi mutu yang diakui secara internasional umpamanya Cambridge, IB, TOEFL/TOEIC, ISO, UNESCO. SNP sendiri memiliki 8 kompetensi yakni lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarpras, dana, pengelolaan dan penilaian.

Dengan konsep ini, SBI adalah sekolah yang sudah memenuhi dan melaksanakan standar nasional pendidikan yang meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Selanjutnya aspek-aspek SNP tersebut diperkaya, diperkuat, dikembangkan, diperdalam, diperluas melalui adaptasi atau adopsi standar pendidikan dari salah satu anggota OECD dan / atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan serta diyakini telah memiliki reputasi mutu yang diakui secara internasional, serta lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional. Dengan demikian diharapkan SBI

harus mampu memberikan jaminan bahwa baik dalam penyelenggaraan maupun hasil-hasil pendidikannya lebih tinggi standarnya daripada SNP. Penjaminan ini dapat ditunjukkan kepada masyarakat nasional maupun internasional melalui berbagai strategi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan konsepsi SBI di atas, maka dalam upaya mempermudah sekolah dalam memahami dan menjabarkan secara operasional dalam penyelenggaraan pendidikan yang mampu menjamin mutunya bertaraf internasional, maka dapat dirumuskan bahwa SBI pada dasarnya merupakan pelaksanaan dan pemenuhan delapan unsur SNP sebagai indikator kinerja kunci minimal dan ditambah (dalam pengertian ditambah atau diperkaya / dikembangkan / diperluas / diperdalam) dengan x yang isinya merupakan penambahan atau pengayaan/pemdalam/penguatan/perluasan dari delapan unsur pendidikan tersebut serta sistem lain sebagai indikator kinerja kunci tambahan yang bertaraf internasional dari salah satu anggota OECD dan/atau negara maju lainnya.

Implementasi konsepsi SBI di tingkat satuan pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan sekolah dalam merumuskan berbagai macam strategi, konsep, manajemen, mutu sekolah, TQM, KTSP, ISO dan berbagai macam karakter unggul lainnya yang semestinya melekat pada sekolah yang berlabel SBI. Tuntutan mutu yang pada sekolah SBI mencerminkan upaya yang rasional, sadar dan sistematis yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengaktualisasikan dirinya mendekatkan dirinya memiliki mutu sesuai standar minimal SBI, atau bahkan standar mutu internasional (sertifikat ISO) dan lain sebagainya.

Tuntutan peningkatan mutu suatu produk atau layanan jasa termasuk pendidikan oleh pelanggan terus terus menerus berkembang dan meningkat dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Masyarakat semakin cerdas dalam memilih lembaga pendidikan, mereka dapat membedakan lembaga pendidikan/sekolah yang berkualitas dan kurang berkualitas.

Disisi lain, pemerintah telah mengambil kebijakan desentralisasi pendidikan, Kebijakan desentralisasi pendidikan merupakan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan nasional. Melalui kebijakan desentralisasi ini diharapkan akan dapat mempercepat usaha peningkatan pemerataan, perluasan akses, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan.

Dalam usaha percepatan kesiapan, akselerasi kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan limpahan kewenangan ini, salah satu strategi yang dipandang penting untuk dimiliki bersama adalah standar mutu pendidikan.

Mutu dalam konsep Deming adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Dalam konsep Deming, pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan keluaran, baik pelayanan dan lulusan yang sesuai kebutuhan atau harapan pelanggan (pasar)nya. Menurut Crosby mutu adalah sesuai yang disyaratkan atau distandarkan (*Conformance to requirement*), yaitu sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan, baik inputnya, prosesnya maupun outputnya. Oleh karena itu, mutu pendidikan yang diselenggarakan sekolah dituntut untuk memiliki baku standar mutu pendidikan.

Dalam rangka implementasi standar mutu dibutuhkan manajemen sekolah yang bersifat dinamis yang menggambarkan upaya nyata dari satuan pendidikan (sekolah) untuk senantiasa mengembangkan konsep "*continue improvement*" dalam peningkatan mutu, baik dalam rangka mendekatkan diri pada standar mutu minimal SBI, maupun upaya menjadi satuan pendidikan yang khas, unik dan berkharakter yang diakui di level internasional.

Dalam rangka mewujudkan konsepsi RSBI/SBI di setiap satuan pendidikan di Indonesia, saat ini semua masih bertumpu pada pengertian yang didasarkan pada konsepsi UU Sisdiknas, adapun *platform* yang mencerminkan *blue print* dan role model yang diharapkan mencerminkan standar mutu SBI belum tersedia secara memadai. Oleh sebab itu masing-masing satuan pendidikan/sekolah yang telah mengembangkan RSBI/SBI masih mencari model yang tepat dalam aspek pengelolaan dan manajemen pendidikannya.

Secara garis besar pengembangan RSBI/SBI di satuan pendidikan sesungguhnya bersifat unik, tidak seragam dan memiliki sifat semi otonom (desentralisasi). Artinya setiap sekolah memiliki kebebasan untuk merumuskan aspek pengelolaan dan manajemen pendidikan sendiri-sendiri. Konsep yang dikembangkan oleh masing-masing sekolah mencerminkan upaya sekolah dalam meraih keunggulan kompetitif.

Konsep pengelolaan manajemen sekolah yang mengembangkan RSBI/SBI bisa dilihat dari aspek manajemen organisasi pendidikan, manajemen sekolah, manajemen kelas, kepemimpinan pendidikan, sistem informasi pendidikan, kurikulum, manajemen peserta didik, manajemen tenaga pendidikan dan non

pendidikan, manajemen keuangan pendidikan, manajemen peningkatan mutu pendidikan, manajemen strategik, manajemen pemasaran pendidikan, kewirusahaan dalam pendidikan, manajemen kerjasama, manajemen supervisi pendidikan dan lain sebagainya.

SMA N I Surakarta merupakan salah satu satuan pendidikan di kota Surakarta yang sesuai amanah UU Sisdiknas oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga Pemerintah Kota Surakarta diberikan kepercayaan untuk mengembangkan diri menjadi satuan pendidikan RSBI/SBI.

Sebagaimana sekolah lain, maka untuk memenuhi ketentuan standar mutu pendidikan sebagaimana Permendiknas nomor 63 tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dan Permendiknas No. 78 tahun 2009 tentang penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, telah mengembangkan pengelolaan mutu melalui pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi ;1).standar isi, 2). standar proses, 3). standar kompetensi lulusan, 4). standar pendidikan dan tenaga pendidikan, 5). standar sarana dan prasarana, 6). standar pengelolaan, 7). Standar pembiayaan dan 8). Standar penilaian pendidikan.

SMA N 1 Surakarta sebagai sekolah yang telah difasilitasi negara untuk mengembangkan satuan pendidikan RSBI, berusaha melakukan penguatan mewujudkan SNP + X. Langkah yang telah dilakukan melalui penerapan kurikulum KTSP, pembelajaran berbasis TIK, bilingual, *sister school* (SMA Taruna Nusantara Magelang, SMA N 1 Klaten, *Smithfield High School* Australia), sebanyak 28 atau 30,43 % dari 92 guru telah bergelar magister (S2), perairan

pengelolaan manajemen mutu berbasis Sertifikat ISO 9001-2008, melaksanakan ujian bahasa Inggris menggunakan standar TOEP (*Test of English Proficiency*), merupakan upaya faktual SMA N 1 Surakarta menuju SBI.

Namun demikian tantangan pengelolaan satuan pendidikan menuju RSBI yang efektif dan berorientasi pada mutu pendidikan memerlukan suatu komitmen yang penuh kesungguhan dalam peningkatan mutu, berjangka panjang (*human investment*) dan membutuhkan penggunaan peralatan dan teknik-teknik tertentu. Komitmen tersebut harus didukung oleh dedikasi yang tinggi terhadap mutu melalui penyempurnaan proses yang berkelanjutan oleh semua pihak yang terlibat yakni melalui manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS), yaitu sebagai model desentralisasi dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah diyakini sebagai model yang mempermudah pencapaian tujuan pendidikan (Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, 2010;305).

Penelitian ini berjudul "Pengelolaan Mutu Pendidikan RSBI (Studi Situs di SMA N I Kota Surakarta)". Penelitian ini sangat menarik dilakukan karena pengelolaan mutu pendidikan RSBI/SBI sangat erat dengan upaya pemerintah untuk mengembangkan satuan pendidikan yang mampu bersaing secara internasional.

Ditengah tantangan dan problem yang dihadapi pemerintah dalam mengembangkan satuan pendidikan menjadi RSBI/SBI tersebut, langkah-langkah yang dilakukan dalam mengembangkan RSBI menuju SBI setiap sekolah bersifat unik dan berbeda satu dengan lainnya. Dengan demikian penelitian ini akan

memberikan kontribusi yang baik bagi pemangku kepentingan bidang pendidikan, khususnya yang sedang mengembangkan RSBI/SBI dalam bentuk *lesson study*.

Perlu diperhatikan pula bahwa saat ini cukup banyak pihak yang mempertanyakan terhadap efektifitas RSBI terhadap peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, begitu pula banyak sekolah yang memaksakan diri untuk menjadi RSBI namun gagal meraih status SBI atau bahkan berdasarkan hasil evaluasi ada yang dikembalikan pada status semula. Hal ini menunjukkan bahwa masih sedikit satuan pendidikan RSBI yang mengetahui langkah strategis dan pengelolaan yang harus dilakukan agar mampu meraih keunggulan kompetitif.

Melalui penelitian ini keberhasilan yang diraih oleh SMA N I Surakarta untuk memenuhi beberapa aspek dalam standar X dan pengelolaan mutu dapat di analisis lebih lanjut, sehingga pengelolaan mutu pendidikan RSBI yang telah diterapkan oleh SMA N I Kota Surakarta merupakan kajian yang menarik untuk dilakukan penelitian terhadap karakteristik, struktur, fungsi dan aktifitas organisasi penjaminan mutu SMA N I Kota Surakarta dalam upaya meraih keunggulan kompetitif menuju SBI.

B. Fokus Penelitian

Setiap satuan pendidikan yang mengembangkan RSBI/SBI senantiasa berupaya agar memiliki keunggulan kompetitif, upaya meraih keunggulan kompetitif dipengaruhi bagaimana sekolah dalam pengelolaan organisasi penjaminan mutu sekolah, maka fokus penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

karakteristik pengelolaan organisasi penjaminan mutu RSBI di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Kota Surakarta.

Sub fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Karakteristik pengelolaan RSBI Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Kota Surakarta.
2. Karakteristik struktur dan tugas organisasi penjaminan mutu Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Kota Surakarta.
3. Karakteristik hubungan kerja organisasi penjaminan mutu Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Kota Surakarta.
4. Karakteristik aktivitas organisasi penjaminan mutu Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Kota Surakarta.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan utama adalah untuk mengetahui dan memahami karakteristik pengelolaan organisasi penjaminan mutu RSBI Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Kota Surakarta.

Adapun sub tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan mamahami karakteristik pengelolaan RSBI Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui dan mamahami karakteristik struktur dan tugas organisasi penjaminan mutu Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Kota Surakarta.
3. Untuk mengetahui dan mamahami karakteristik hubungan kerja organisasi penjaminan mutu Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Kota Surakarta.

4. Untuk mengetahui dan memahami karakteristik aktivitas organisasi penjaminan mutu Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Kota Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik yang bersifat praktis maupun yang bersifat teoritis. Manfaat tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

1. Manfaat praktis penelitian ini adalah bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi bagi Dinas Pendidikan Kota Surakarta sebagai bahan masukan untuk mengambil kebijakan tentang optimalisasi pengelolaan organisasi penjaminan mutu di sekolah yang mengembangkan konsep RSBI/SBI untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Bagi Kepala Sekolah dan SMA N I Organisasi penjaminan mutu Kota Surakarta sebagai dasar mengambil tindakan untuk optimalisasi pengelolaan organisasi penjaminan mutu di sekolah yang mengembangkan konsep RSBI/SBI.
2. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan wawasan bagi penelitian selanjutnya pada Program Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, khususnya manajemen pengelolaan pada sekolah dalam bidang manajemen strategi dan manajemen mutu sekolah.

E. Daftar Istilah

1. Pengelolaan Sekolah adalah pengkoordinasian dan penyerasian sumberdaya yang dilakukan secara otonomis (mandiri) oleh sekolah

melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional, dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan (partisipatif).

2. Organisasi penjaminan mutu adalah unit yang bertugas menyusun, mengelola, mengevaluasi dan mutu yang ingin dicapai oleh sekolah dalam meraih keunggulan kompetitif.
3. Pengelolaan manajemen mutu pendidikan adalah kegiatan merumuskan dokumen mutu sesuai dengan Pedoman Penjaminan Mutu SBI yang dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (2007) dan atau standar mutu TQM dan ISO 9000:2008.
4. Struktur organisasi penjaminan mutu adalah struktur organisasi penjaminan mutu yang terbentuk di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Kota Surakarta.
5. Tugas organisasi penjaminan mutu adalah tugas setiap jabatan di dalam organisasi penjaminan mutu yang terbentuk di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Kota Surakarta.
6. Hubungan kerja organisasi penjaminan mutu adalah pola hubungan komunikasi antara jabatan di dalam organisasi penjaminan mutu dengan unit lainnya di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Kota Surakarta.
7. Aktifitas organisasi penjaminan mutu adalah semua kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi penjaminan mutu di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Kota Surakarta.

9. ISO 9001:2008 singkatan dari International Standardization Organization merupakan salah satu konsultan swasta berkedudukan di Jenewa Swiss yang menyediakan pelayanan penjaminan Sistem Manajemen Mutu institusi swasta atau lembaga pemerintah, standar Internasional ini diimplementasikan pada “pendekatan proses” kinerja organisasi tentang keefektifan sistem manajemen mutu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan (*costumer satisfaction*).